

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Linguistik dalam analisis bahasa selalu memandang setiap bahasa adalah bulat, utuh, dan sempurna dalam menjalankan fungsinya sebagai "pelayan" terhadap pemakainya, yaitu untuk mengembangkan akal budi dan kebudayaan penutur-penuturnya maupun sebagai dasar kerja sama antarpemuturnya (Moeliono, 1981:22). Karena bahasa-bahasa biasanya berfungsi dalam satu matrik sosial dan karena masyarakat sangat tergantung pada bahasa sebagai sarana interaksi yang teramati, dapat diharapkan bahwa manifestasinya yang teramati itu, perilaku bahasa, dan perilaku sosial akan saling berhubungan dalam cara yang teratur (Alwasilah, 1986:2).

Sosiolinguistik membidangi faktor-faktor sosial dalam skala besar yang saling bertimbal balik dengan bahasa dan dialek-dialek. Sebagai contoh dapat dikemukakan problem

menurunnya asimilasi bahasa-bahasa minoritas, perkembangan perkembangan pembakuan bahasa, dan perencanaan bahasa. Pada sisi lain, sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian-perincian dalam penggunaan yang sebenarnya yang oleh Hymes disebut "The Ethnography of Speaking". Beberapa contoh, misalnya, pemakaian bahasa tertentu yang menyangkut bentuk-bentuk peristiwa ujaran, pilihan-pilihan yang dilakukan penutur, topik pembicaraan, dan latar pembicaraan (Hymes, 1985:9).

Peristiwa komunikasi, bagi orang kebanyakan, memang tidak perlu dipermasalahkan apalagi dianalisis. Namun, dalam komunikasi akan timbul konsekuensi yang sangat tidak menguntungkan apabila pesan yang disampaikan tidak diterima dengan sempurna oleh penerima pesan tersebut. Ketidaklancaran dalam komunikasi akan menyebabkan tidak tercapainya saling pengertian antar penutur (Cook, 1989:24).

Fokus dalam penelitian ini adalah komunikasi lisan dengan pertimbangan bahwa bila kita tidak hidup dalam kesendirian, maka kita pasti selalu terlibat dalam penggunaan bahasa baik sebagai pembicara atau hanya sebagai pendengar. Selain itu, selama ini, bentuk bahasa percakapan kurang mendapat perhatian dari pakar bahasa maupun para peminat bahasa. Kurangnya perhatian ini dapat dimaklumi karena munculnya pendapat bahwa bahasa percakapan tidak beraturan, tidak memiliki tahap baku, peralihan giliran tidak menentu,

tema pembicaraan sangat luas, sehingga data bahasa percakapan tidak dapat disistematiskan secara inheren (Marcelino, 1993:60).

Dalam percakapan yang lancar, proses perubahan dari pembicara menjadi pendengar dan dari pendengar menjadi pembicara terjadi sangat cepat dan terasa sebagai peristiwa biasa yang wajar karena penyampaian informasi tidak terhambat. Kecepatan ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain, kemampuan berbahasa dari kedua pihak yang berkomunikasi. Seperti yang dikemukakan oleh Hymes bahwa komunikasi juga memperhitungkan proses kognitif pendengar dan pembicara (dalam Saville, 1989:3). Ditegaskan pula oleh Hymes bahwa kemampuan komunikasi tidak hanya meliputi aturan-aturan komunikasi yaitu linguistik dan sosiolinguistik, namun juga aturan-aturan interaksi serta pengetahuan dasar tentang konteks, isi komunikasi dan proses interaksinya (Hymes, 1985:20).

Ketidaklancaran dalam sebuah percakapan mungkin dirasakan sebagai hal yang wajar, namun hal tersebut juga bisa berakibat fatal pada jenis percakapan tertentu, misalnya percakapan yang menyangkut masalah hukum. Hukum selalu mengandung aturan-aturan, konsepsi-konsepsi, dan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh penguasa pembuat hukum untuk disampaikan pada masyarakat, dipahami, disadari akan

maksudnya, dan dipatuhi. Hukum juga senantiasa memiliki ketetapan dan kepastian. Oleh karena itu, maka salah penginterpretasian di bidang hukum akan berakibat fatal. Salah satu jenis percakapan hukum yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah percakapan sidang pengadilan. Percakapan ini membuktikan bahwa tidak semua bahasa percakapan tidak beraturan. Percakapan sidang pengadilan ini merupakan salah satu jenis percakapan yang terstruktur, yaitu adanya pertanyaan dari para penegak hukum yang harus dijawab oleh terdakwa dan para saksi.

Makna ujaran tidak sepenuhnya ada dalam ujaran dan menunggu untuk ditafsirkan. Makna dapat berwujud kalau ada interaksi antara penuturnya melalui ujaran. Oleh karena itu, untuk mendapatkan interpretasi yang benar terhadap ujaran dalam sidang pengadilan tersebut, tentunya tidak hanya tergantung pada pengetahuan seseorang di bidang hukum, tetapi juga ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi interpretasi, misalnya, siapa yang berbicara, kepada siapa ujaran tersebut ditujukan, topik percakapan serta tujuannya, dan sebagainya.

Pengetahuan tentang siapa yang berbicara akan sangat berpengaruh terhadap ujaran yang dilontarkan, baik jenis registernya, nada bicarannya, topik pembicaraannya, maupun tindak partisipan. Semua itu, secara tidak langsung akan mempengaruhi pendengar dalam menginterpretasikan ujaran

pembicara.

Pengetahuan tentang kepada siapa ujaran tersebut ditujukan adalah hal yang sama pentingnya dengan mengetahui siapa yang berbicara. Seorang Sarjana Hukum biasanya dengan mudah dapat memahami suatu perkara di pengadilan karena pengalaman dan pengetahuannya sangat membantu. Dia dapat meramalkan apa yang akan terjadi dan ujaran apa yang akan muncul. Sekiranya meleset, dia dapat mengadakan penyesuaian-penyesuaian dan membuat ramalan baru. Namun, tidak selamanya hal itu membantu karena saksi-saksi dan terdakwa yang dihadapinya tidak selalu sama baik pendidikan, status sosial, maupun budayanya. Dalam hal ini, penegak hukum harus mempertimbangkan apakah lawan bicarannya akan mampu menginterpretasikan dengan benar sesuai maksud pembicara. Sebaliknya, jika pembicarannya adalah saksi-saksi maupun terdakwa, mereka juga harus memperhatikan kepada siapa ujaran tersebut ditujukan.

Peristiwa tutur bermacam-macam dan hal ini ditentukan oleh tujuan percakapan. Sebaliknya, tujuan/maksud tutur akan diketahui dan tercermin melalui tindak tuturnya. Tindak tutur yang manakah yang akan digunakan sangat tergantung pula pada beberapa faktor antara lain kepada siapa ia akan bertutur, bagaimana situasinya, topik tuturan, dan sebagainya. Sehubungan dengan makna ujaran, Suwito (1985:34) mengatakan bahwa tindak tutur dalam ujaran suatu kalimat merupakan penentu makna kalimat itu. Oleh karena makna kalimat dan

tindak tutur bukan dua studi yang berbeda, maka penelitian ini juga akan menganalisis tindak tutur yang ada dalam percakapan sidang pengadilan untuk mengetahui makna ujarannya dan faktor-faktor luar bahasa yang melatarbelakanginya.

Setiap peristiwa itu akan berbeda cara penuturannya karena setiap peristiwa menghendaki tutur tertentu (Wahab, 1993:92). Pesan yang hendak disampaikan harus tepat (terutama menyangkut bidang tertentu, misalnya hukum) karena bentuk pesan ini bersifat fundamental dan penting. Banyak pesan yang tidak dapat diterima dengan baik karena bentuk pesannya tidak sesuai dengan pendengar yang dihadapi atau dengan situasinya.

Selain itu ada hal lain yang menyebabkan pesan tersebut menjadi berbeda dengan yang dimaksudkan pembicara/penutur, yaitu karena lawan bicara mempunyai konsep pemikiran yang berbeda terhadap tutur yang disampaikan pembicara. Keadaan seperti ini akan sering dijumpai dalam percakapan sidang pengadilan. Dengan kata lain, perbedaan konsep ini menjadi fenomena yang umum dalam sidang dan hal ini pulalah yang akan menjadi salah satu bagian dalam penelitian ini.

1.2. Perumusan Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan komunikasi melalui bahasa baik verbal maupun nonverbal atau linguistik dan nonlinguistik. Komunikasi yang dilakukan melalui interaksi verbal (percakapan), pembicara mengirimkan

pesan dalam bentuk konteks-konteks kepada pendengar melalui kontak bahasa (Pateda, 1990:19). Pesan tersebut akan ditangkap dan diinterpretasikan oleh konsep pemikiran lawan bicara. Masalahnya adalah apakah reference pembicara dan lawan bicara sama sehingga dapat menginterpretasikan dengan tepat atau tidak.

Komunikasi lisan atau interaksi verbal di atas, dalam pemakaian bahasanya tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor linguistik, tetapi juga nonlinguistik (ekstra linguistik) karena bahasa juga terdiri dari sistem makna dan fungsi yang mengikatnya dengan hal-hal di luar bahasa seperti sosial dan situasional serta beberapa konteks. Keadaan itu juga berlaku dalam percakapan/interaksi sidang pengadilan. Sedangkan faktor luar bahasa itu dapat pula ditentukan setelah kita mengetahui makna tindak-tanduk tutur yang terkandung di dalamnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini berusaha menjawab masalah:

- Bagaimana penginterpretasian terhadap ujaran sidang pengadilan berdasarkan konsep penuturnya?
- Bagaimana penginterpretasian makna ujarannya berdasarkan tindak tutur?
- Komponen tutur apa sajakah yang berperan dalam penginterpretasian makna ujaran sidang pengadilan tersebut?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam, khususnya tentang penginterpretasian terhadap makna ujaran dalam percakapan sidang pengadilan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui penentuan makna ujaran sidang berdasarkan konsep penuturnya.
- Mengetahui makna ujaran berdasarkan tindak tutur yang ada di dalamnya.
- Mengetahui komponen tutur dalam sidang pengadilan yang berperan dalam penginterpretasian makna ujaran sidang.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai penginterpretasian makna ujaran bahasa Indonesia dalam percakapan sidang pengadilan. Dengan demikian, skripsi ini dapat dimanfaatkan dalam bidang kebahasaan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu linguistik pada umumnya dan sosiolinguistik pada khususnya, terutama studi-studi tentang penginterpretasian makna ujaran. Selain itu, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan petunjuk bagi siapa pun yang ingin mengkaji objek penelitian ini lebih lanjut, yaitu interpretasi makna ujaran dalam percakapan sidang pengadilan.

Sedangkan manfaat praktis yang diharapkan penulis adalah hasil penelitian ini akan mampu dijadikan penambah wawasan bagi yang berkepentingan, sehingga berguna dalam praktek yaitu para pihak-pihak yang berperan dalam sidang pengadilan mampu menggunakan bahasa dengan baik dan mampu menginterpretasikan makna ujaran hukum dengan tepat.

1.4. Landasan Teori

Landasan teori diperlukan sebagai pembimbing yang menuntun dan memberi arah bagi sebuah penelitian. Oleh karena itu, teori haruslah memberi pemahaman terhadap objeknya (Sudaryanto, 1992:26).

Penelitian tentang penginterpretasian makna ujaran selalu erat kaitannya dengan pemakaian bahasa. Masyarakat Indonesia memiliki profesi yang berbeda-beda. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai alat komunikasi tentu saja bahasa Indonesia. Namun, penggunaan bahasa Indonesia atau pemilihan registernya pun pasti berbeda. Bahasa yang dipergunakan oleh pemakainya menurut pada suatu pola pemakaian sesuai dengan fungsi, situasi, dan konteksnya (Poedjosudarmo, 1984:91). Bahasa sebagai alat komunikasi tidak hanya terikat oleh kaidah-kaidah gramatikal, tetapi juga terikat oleh aturan-aturan atau norma-norma sosial, faktor-faktor situasional, dan nilai-nilai kultural. Dengan kata lain, pemakaian bahasa lebih mengutamakan aspek tutur daripada aspek bahasa. Sebagai aspek tutur, bahasa relatif

berubah-ubah sesuai dengan perubahan konteksnya.

Perubahan pemakaian bahasa tentu mengakibatkan perubahan pada maknanya. Oleh karena itu, menginterpretasikan ujaran harus memperhatikan pemakaian bahasa pada situasi dan konteks tertentu. Hymes (1985:54-62) merumuskan unsur-unsur konteks tersebut dalam akronim **SPEAKING** yang merupakan salah satu topik dalam etnografi komunikasi yang disebut sebagai variabel sosiolinguistik. Masing-masing fonem merupakan faktor yang dimaksudkan:

- Setting dan scene (tempat dan suasana)

Latar mengacu pada waktu dan tempat, pada umumnya menyangkut lingkungan fisik. Sedangkan suasana menunjuk latar psikologinya. Termasuk dalam latar tempat dan adalah hubungan antara pembicara, lawan bicara, serta pendengar, gerak gerik tubuhnya, maupun rona mukanya.

- Partisipan (peserta komunikasi)

Partisipan yaitu seluruh peserta tutur tersebut. Dalam hal ini, Hymes membedakan antara pembicara, lawan bicara, dan pendengar. Pengetahuan tentang pembicara, pendengar, dan kepada siapa ujaran tersebut ditujukan akan memudahkan penginterpretasian ujaran pada situasi tertentu.

- End (tujuan)

Tujuan komunikasi adalah penyampaian buah pikiran penutur dan informasi. Tujuan ini erat kaitannya dengan pokok tuturan. Banyak kata-kata yang mempunyai makna lain dalam

bidang-bidang tertentu.

- Act (pokok tuturan)

Pokok tuturan merupakan komponen tutur yang mudah berubah dan perubahan ini sangat berpengaruh pada ujaran-ujaran dalam peristiwa tutur.

- Key (nada tutur dan ragam bahasa)

Nada tutur dapat bersifat verbal dan nonverbal. Nada tutur verbal perubahan bunyi yang dapat menunjukkan tuturan serius, humor, santai, emosi, dan sebagainya. Nada tutur nonverbal dapat ditampilkan dengan gerak anggota badan, perubahan air muka, sorot mata, dan sebagainya. Berbagai penggunaan bahasa dalam situasi dan suasana yang berbeda-beda itu pada akhirnya menentukan ragam bahasa yang akan digunakan oleh penutur.

- Instrumen (sarana)

Berkaitan dengan pemakaian ragam bahasa yang disampaikan dalam peristiwa tutur, sarana atau alat tutur ini juga sangat mempengaruhi bentuk tuturan yang muncul. Sarana yang dimaksudkan adalah sarana lisan atau tulisan. Pemilihan sarana ini tergantung pada beberapa faktor kepada siapa ia berbicara dan dalam situasi yang bagaimana.

- Norm of interpretation (aturan komunikasi/peristiwa tutur)

Norma tutur adalah aturan permainan yang harus ditaati oleh setiap peserta dalam peristiwa tutur. Aturan komunikasi dalam diskusi tentu berbeda dengan aturan wawancara atau

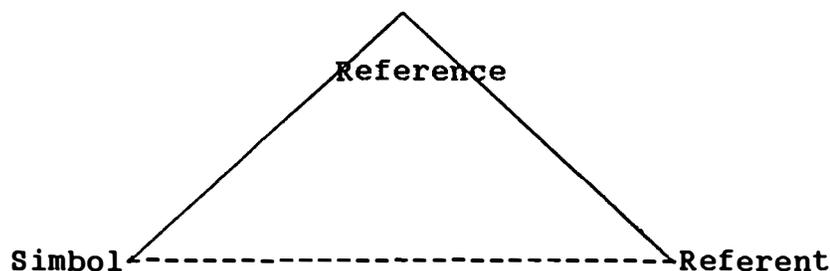
jenis peristiwa tutur yang lain.

- Genre (bentuk tutur/pesan)

Komponen ini merupakan jenis peristiwa tutur dan bentuk pesan yang memiliki sifat-sifat lain. Pesan yang hendak harus tepat karena bentuk pesan ini sangat fundamental dan penting.

Menurut Hymes (1985:65), lengkapnya pengetahuan seseorang tentang ciri-ciri konteks tersebut, akan lebih tepatlah interpretasinya terhadap makna ujaran dalam sebuah peristiwa tutur. Sekalipun komponen-komponen dalam SPEAKING saling berkaitan dan mempengaruhi bentuk tutur serta makna tuturan, namun tidak semua butir komponen turut berperan.

Dalam percakapan, masalah yang dihadapi partisipan adalah memperoleh maksud yang sesuai dengan apa yang disampaikan pembicara. Hal ini akan erat kaitannya dengan hubungan antara pikiran dengan kata-kata, benda, maupun segala situasi dan peristiwa. Bagi peneliti, teori yang dapat menjelaskan ini adalah segitiga makna yang dikemukakan oleh Ogden dan Richard (dalam Parera, 1990:43). Mereka menggambarkan teori tersebut sebagai berikut:



- **Simbol** dipakai kata yang merujuk pada benda, situasi, peristiwa, dan sebagainya. Bahasa simbolik, seperti yang didefinisikan oleh mereka, adalah bahasa yang sesuai dengan fakta. Simbol itu bebas dan harus diverifikasikan dengan fakta.
- **Reference** adalah pemikiran terhadap suatu objek yakni ke satu acuan.
- **Referent** merujuk pada sesuatu di luar otak manusia dan berada di dunia ini. Jika kita mempergunakan simbol, maka kita merujuk kepada acuan, misalnya apa itu, di mana itu, kapan itu, maupun siapa itu yang berada di dunia nyata.

Searle (dalam Suwito, 1985:33) berpendapat:

"Dalam peristiwa tutur terdapat tindak tutur. Komunikasi linguistik bukan sekedar lambang, kata, atau kalimat, melainkan produk atau hasil dari lambang, kata, atau kalimat yang berwujud perilaku atau tindak tutur dalam kondisi tertentu dan merupakan kesatuan terkecil dari komunikasi linguistik."

Tindak tutur dalam ujaran suatu kalimat merupakan penentu makna kalimat itu. Pembicara menuturkan kalimat tertentu karena dia berusaha menyesuaikan tuturannya dengan konteks yang melingkupinya (Suwito, 1985:34). Misalnya, apabila seseorang ingin mengemukakan sesuatu kepada orang lain, maka apa yang ingin disampaikan itu mengandung makna agar orang lain mengetahui maksudnya. Oleh karena itu, penutur harus menuangkan maksud tersebut dalam wujud tindak tutur.

Penganalisisan makna tindak tutur dalam sidang pengadilan ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh J.L Austin (dalam Edmondson, 1981:75) yaitu tiga macam tindak tutur yang terjadi secara serentak:

- Tindak lokusi yang mengaitkan suatu topik dengan satu keterangan dalam suatu ungkapan. Dalam ilmu bahasa, tindak lokusi tersebut dapat kita samakan dengan predikasi.
- Tindak ilokusi yaitu pengucapan suatu pernyataan, tawaran, dan sebagainya. Tindak ilokusi ini merupakan tindakan dalam mengatakan sesuatu/ maksud kalimat.
- Tindak perlokusi adalah tindakan dengan mengatakan sesuatu, yaitu hasil atau efek oleh ungkapan pembicara sesuai dengan situasi dan kondisi pengucapan tutur itu.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian bahasa bertujuan mengumpulkan dan mengkaji data, serta mempelajari fenomena-fenomena kebahasaan (Djajasudarma, 1993:3). Oleh karena itu, metode penelitian merupakan alat, prosedur, dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan rangkain penelitian tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan fakta yang ada berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian deskriptif semata-mata dilakukan berdasarkan fakta dan fenomena-fenomena yang hidup pada penutur-penuturnya, sehingga yang dihasilkan dan dicatat

berupa perian bahasa yang sifatnya seperti potret; paparan seperti adanya (Sudaryanto, 1992:62). Dalam hal ini, peneliti berusaha mengemukakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penginterpretasian makna ujaran dalam sidang pengadilan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena metode ini akan menghasilkan data yang diinginkan peneliti yaitu data deskriptif berupa data lisan dalam sidang pengadilan.

1.5.1. Operasionalisasi Konsep

Penjelasan terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan munculnya penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti.

- Konsep ujaran dalam penelitian ini mengacu pada ujaran yang merupakan alat untuk komunikasi yang tergantung pada konteks baik dari segi makna maupun dari segi gramatikal. Dengan kata lain, ketika berkomunikasi, kita mengkomunikasikan amanat dan proses itu terkondisi oleh berbagai situasi.
- Konteks situasi adalah lingkungan nonlinguistik ujaran yang merupakan alat untuk memperinci ciri-ciri situasi yang diperlukan untuk memahami makna ujaran.
- Makna merupakan hubungan dalam arti kesepadanan atau ketidaksepadanan antara faktor bahasa dan faktor-faktor di luar bahasa.
- Interpretasi adalah penafsiran atau praanggapan terhadap

ujaran-ujaran yang disampaikan penutur.

- **Bahasa hukum** adalah bahasa yang merupakan peta, wakil, simbol, dan sarana yang digunakan oleh masyarakat pemakai hukum. Bahasa hukum ini juga merupakan bagian integral dan alat fungsional dalam kehidupan dan kegiatan di bidang hukum.

Sedangkan konsep-konsep istilah hukum terdiri dari konsep hakim, jaksa, penasihat hukum, terdakwa, dan saksi.

- **Hakim** adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.
- **Jaksa** adalah seorang pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
- **Penasihat hukum** adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang untuk memberi bantuan hukum.
- **Terdakwa** adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
- **Saksi** adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, serta peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat, atau ia alami sendiri.

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan data yang maksimal baik berupa percakapan maupun segala sesuatu yang terjadi selama peristiwa tutur berlangsung.

Data berupa percakapan diperoleh dengan cara merekam semua percakapan sidang antara para penegak hukum dengan terdakwa dan para saksi. Dalam satu kasus bisa diajukan kurang lebih tiga sampai empat saksi dalam satu hari. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tidak merekam satu kasus mulai awal sampai selesai. Untuk satu kasus, peneliti merekam satu atau dua saksi yang diajukan, kemudian pindah ke ruangan lain. Hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan data percakapan dari berbagai kasus dan bermacam-macam saksi.

Selain itu, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang tidak mungkin diperoleh melalui perekaman, misalnya latar tempat, suasana, tindak partisipan, dan sebagainya.

Pengamatan yang diterapkan oleh peneliti adalah pengamatan tidak berperan serta, yaitu peneliti hanya melakukan satu fungsi yaitu mengadakan pengamatan (observasi) tanpa ikut serta dalam percakapan yang sedang berlangsung. Pengamatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini juga disebut pengamatan tertutup karena pengamat beroperasi dan melakukan pengamatan tanpa diketahui oleh para subjek (Djajasudarma, 1993:12).

Teknik pengumpulan data yang terakhir dilakukan peneliti adalah teknik catat. Percakapan sidang yang berhasil direkam kemudian dicatat seperti apa adanya. Peneliti juga berusaha mencatat hasil pengamatan terhadap tindak partisipan selama sidang berlangsung sebagai pelengkap data. Terakhir kali,

peneliti melakukan wawancara dengan para partisipan dalam sidang untuk mengetahui interpretasi mereka terhadap ujaran-ujaran yang ditujukan pada mereka. Wawancara juga dilakukan pada pembicara untuk mengetahui apa sebenarnya maksud ujaran yang disampaikannya.

1.5.3. Korpus Data

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya dan untuk keperluan data peneliti mengambil enam kasus yang diambil dari kasus pidana maupun kasus perdata. Peneliti tidak membedakan jenis kasusnya karena semua sidang sama, baik aturan maupun tata caranya. Dalam penggunaan bahasa, yang membedakan adalah pemakaian ungkapan, kata, dan istilah teknis hukum karena tergantung pada kasus yang disidangkan.

Penelitian ini melibatkan masyarakat yang terlibat dalam suatu kasus yang telah disidangkan dan masyarakat penegak hukum yang menanganinya. Partisipan yang terlibat langsung dalam sidang, yaitu penegak hukum yang terdiri dari hakim ketua, hakim anggota, penasihat hukum, jaksa penuntut umum, saksi-saksi, dan terdakwa. Hal lain yang dipertimbangkan dalam korpus data ini adalah latar pendidikan, pekerjaan, dan status partisipan dalam sidang. Hal ini perlu karena akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menginterpretasikan ujaran.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Secara deskriptif, peneliti dapat memerikan ciri-ciri, sifat-sifat, serta gambaran data melalui pemilahan data yang dilakukan pada tahap pemilahan data setelah data terkumpul (Djajasudarma, 1993:16). Dengan demikian, peneliti akan selalu mempertimbangkan data dari segi data itu sendiri dan hubungannya dengan data lainnya secara keseluruhan. Selain berpandangan bahwa data itu memang demikian adanya, peneliti juga akan memerikan data berdasarkan teori yang telah dipilih peneliti sebagai landasan untuk menganalisis data.

Data-data yang diperoleh melalui perekaman yang telah dicatat tersebut akan dikelompokkan antara ujaran yang diinterpretasikan dengan tepat dan ujaran yang mengalami hambatan dalam penginterpretasian. Data yang memuat ujaran/tutur yang terhambat interpretasinya dikelompokkan lagi berdasarkan sebab-sebab hambatan, yaitu perbedaan konsep, tindak tutur, dan komponen tutur yang berperan.

Hasil wawancara merupakan data pendukung untuk membandingkan penyebab salah penginterpretasian yang ditemukan peneliti dan pengakuan penutur. Hasil wawancara tersebut juga membantu peneliti dalam menarik dugaan-dugaan terhadap sebab-sebab yang melatarbelakangi salah penginterpretasian.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBYEK PERMASALAHAN